



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PENGAWASAN PENANGANAN STUNTING

TANGGAL 26 NOVEMBER 2020

SAMPAI DENGAN

TANGGAL 28 NOVEMBER 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, NOVEMBER 2020**



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
“PENGAWASAN PENANGANAN STUNTING”
KE KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 26 NOVEMBER S.D. 28 NOVEMBER 2020**

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, diantaranya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu permasalahan utama Indonesia saat ini adalah stunting. Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2018, prevalensi anak Indonesia di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting (pendek) yaitu 30,8 persen atau sekitar 7 juta balita. Proporsi status gizi sangat pendek dan pendek menurut provinsi paling tinggi yaitu di Nusa Tenggara Timur yang mencapai 42,6 persen dan terendah di DKI Jakarta sebesar 17,7 persen.

Walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 (Riskedas 2018) menjadi 27,67% tahun 2019 atau turun sekitar 3,13%, namun prevalensi ini masih jauh dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) yaitu prevalensi stunting di bawah 20 %. *World Bank* atau Bank Dunia mencatat prevalensi *stunting* di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1996 sebesar 48,1 hingga 36,4 pada 2013.

Permasalahan stunting ini sangat serius mengingat anak sudah mengalami gagal tumbuh yang akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif yang secara nasional akan berpengaruh terhadap daya saing bangsa. Penelitian di berbagai negara berkembang menyatakan bahwa stunting memiliki banyak dampak buruk pada masa depan anak-anak. Mereka yang stunting cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah. Selain itu, balita yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. *World Bank* mencatat kenaikan stunting 1% secara nasional berkorelasi

dengan penurunan produktivitas ekonomi 1,4% di negara berkembang di Asia dan Afrika.

Menanggulangi permasalahan stunting dan kasus gizi buruk merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kedua 'zero hunger atau nol kelaparan'. Pada tahun 2030 mendatang, Indonesia bersama negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target dunia pada 2025 untuk penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita

2.2 LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 11 November 2020.

2.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif tentang penanganan stunting di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk kebijakan komprehensif yang dilakukan.
2. Mendapatkan informasi dan data tentang anggaran dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat untuk penanganan stunting.
3. Mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang upaya sinergitas berbagai SKPD dan dengan sektor swasta dalam penanganan stunting di Kabupaten Manggarai Barat.
4. Mendapatkan masukan tentang kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penanganan stunting yang dapat didukung Komisi IX DPR RI dan Pemerintah Pusat.

2.4 KELUARAN

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI, BKKBN dan BPJS Kesehatan untuk mengambil terobosan dan kebijakan yang dapat mengakselerasi prioritas Pemerintah untuk menanggulangi Stunting sehingga target pemerintah menurunkan stunting hingga menjadi 14% di tahun 2024 dapat tercapai.

2.5 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pertemuan dengan Bupati Manggarai Barat yang dihadiri oleh:
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat
 2. Bappeda Kabupaten Manggarai Barat
 3. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 4. Dinas Tenaga Kerja Manggarai Barat
 5. Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat
 6. BPJS Kesehatan Regional IX dan BPJS Kesehatan Manggarai Barat
 7. RSUD Komodo Labuan Bajo
 8. Perwakilan Puskesmas
 9. Perwakilan Kader Posyandu
 10. Perwakilan Kampung KB

2. Peninjauan Desa Stunting
Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI mengunjungi salah satu desa dimana banyak anak-anak yang mengalami stunting.

2.6 WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 26 November 2020 sampai dengan Tanggal 28 November 2020.

2.7 SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak Immanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Partai Golkar. Adapun Anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi tim Kunjungan Kerja Spesifik adalah sebagai berikut:

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

3.1 Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kabupaten Manggarai Barat

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka penderita stunting terbesar dan jadi prioritas pemerintah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, NTT merupakan provinsi yang menempati posisi stunting tertinggi se-Indonesia yaitu sebesar 42,6 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sebesar 30,8%. Tidak main-main, sebanyak 269.658 balita atau 43% dari 633.000 balita di NTT tercatat mengalami stunting (berbadan pendek) dan 12% atau 75.960 balita di antaranya mengalami wasting (kurus).

Imbas dari stunting ini dikhawatirkan dapat berdampak pada hilangnya generasi emas di NTT, dan bonus demografi yang harusnya bisa kita peroleh di tahun 2035 menjadi tertunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Tidak hanya berdampak pada hilangnya generasi di masa yang akan datang. Akibat kasus stunting di NTT, provinsi kepulauan tersebut mengalami potensi kerugian mencapai Rp1,97 Triliun atau 3% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sejumlah Rp99,09 triliun. Sebaliknya, jika stunting berhasil diturunkan, negara akan memperoleh keuntungan ekonomi sampai dengan 48 kali lipat dari investasi yang dikeluarkan.

Penanganan stunting di NTT perlu terus ditingkatkan. Dari jumlah penderita gizi buruk di Nusa Tenggara Timur, hanya 3.057 anak yang ditangani dan mendapatkan perawatan. Hal ini berdampak pada tingginya risiko kematian yang disebabkan oleh gizi buruk, yaitu 11,6%. Sedangkan risiko kematian balita akibat kombinasi pendek dan kurus tidak kalah tingginya yaitu mencapai 12,3 %.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten prioritas penanganan stunting. Data Riskesdas 2013 menunjukkan angka prevalensi stunting di Kabupaten ini sebesar 49,3 jauh di atas rata-rata nasional. Saat ini, total anak stunting di Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 3,356 anak yang menyebar di 12 Kecamatan. Angka stunting terbanyak berada di wilayah Kecamatan Sano Nggoang dan Komodo.



Peta Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan hasil pengukuran status gizi balita pada bulan Agustus 2020 di Kabupaten Manggarai Barat melalui aplikasi EPPGBM secara by name by address dari sasaran balita sebesar 22.850 anak balita, dengan jumlah balita yang diukur antropometri sebanyak 21.928 (95,96%) dan didapatkan prevalensi angka stunting pada balita sebesar 17,3 % (3.788 anak), sedangkan prevalensi stunting baduta (dibawah dua tahun) sebesar 13,48 % (1.259 anak). Kemudian prevalensi *stunting* ini menurun dari penimbangan bulan Februari 2020 sebesar 19,1% (4.040 balita) dan 16,05 % (1.479 Baduta) pada baduta dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 23.384 balita (100%) dibandingkan prevalensi stunting 19,6 % pada balita dan 15,39 % pada baduta tahun 2019 (sumber data e-PPGBM di unduh tanggal 21 November 2020).

Dari 164 desa dan 5 kelurahan di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, prevalensi *stunting* pada balita ada 73 desa/kelurahan (43,20%) di atas 20% atau berada di atas batas kategori aman ($\geq 20\%$ kronis). Berarti ada 43,20% yang memiliki masalah kesehatan masyarakat, namun tetap juga diwaspadai desa dengan kategori sedang dengan prevalensi 10-20% sebanyak 38 desa (22,49%), kategori ringan dengan prevalensi 5-10% sebanyak 26 desa (15,38%) dan kategori sangat ringan sebanyak 32 desa (18,93%) karena data e-PPGBM bersifat dinamis.

3.2 Determinan Sosial dari Permasalahan Gizi anak

Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, kita harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak kita, termasuk faktor sosial. Hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk stunting anak yang tidak hanya dipengaruhi tingkat ekonomi masyarakat tetapi juga permasalahan sosial. Seperti kita ketahui, anak stunting tidak hanya ditemukan di desa tetapi juga diperkotaan.

Begitu banyak kebiasaan masyarakat kita yang turut andil terhadap gizi buruk anak. Berdasarkan penelitian, sekitar 55 juta orang di seluruh negeri atau sekitar 22 persen dari jumlah penduduk – masih mempraktikkan buang air besar sembarangan. Sebuah kebiasaan yang sangat tidak sehat yang mengakibatkan tingginya penyakit diare dan gizi buruk pada masa kanak-kanak. Selain itu, adat dan konstruksi sosial yang masih mendorong adanya pernikahan dini bagi anak perempuan juga menjadi faktor sosial yang tidak selaras dengan fungsi reproduksi perempuan juga berkontribusi tingginya angka stunting.

Rendahnya tingkat pemberian ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) juga turut berperan dari pemenuhan gizi bayi dan balita. Data Kementerian Kesehatan mencatat walaupun angka IMD di Indonesia meningkat dari 51,8 persen pada 2016 menjadi 57,8 persen pada 2017, namun angka itu disebut masih jauh dari target sebesar 90 persen. Begitu juga dengan angka pemberian ASI eksklusif masih sebesar 35,7 persen pada 2017. Seharusnya angka ini mencapai di atas 50 persen.

Penelitian juga mencatat bahwa meningkatnya rata-rata tingkat pendidikan ayah dan ibu, membaiknya sanitasi layak dan akses rumah tangga terhadap air bersih, naiknya tingkat kesejahteraan rumah tangga, dan perbaikan asupan gizi ibu dan anak baik melalui perubahan pemahaman terkait pola pengasuhan merupakan faktor-faktor yang mengubah status gizi anak-anak.

Adapun faktor determinan stunting di Kabupaten Manggarai Barat yaitu dari balita yang bermasalah gizi adalah 317 balita tidak memiliki Jaminan Kesehatan, 25 balita tidak ada air bersih, 89 balita pernah mengalami kecacangan, 59 balita tidak mempunyai jamban sehat, 7 balita belum Imunisasi lengkap, 560 anggota rumah tangga balita masih merokok, 149 ibu balita sewaktu hamil KEK, dan 17 balita yang bermasalah gizi mempunyai penyakit penyerta.

3.3. Penanganan Stunting di Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kesehatan termasuk penanganan stunting. Hal ini karena pada masa pandemi, fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu, dan hilangnya pendapatan. UNICEF memperkirakan COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi di Indonesia, sehingga perlu segera dilakukan intervensi.

Estimasi UNICEF baru-baru ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya tindakan yang tepat waktu, jumlah anak yang mengalami wasting atau kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun dapat meningkat secara global sekitar 15 persen tahun ini karena COVID-19. Ini berarti ada peningkatan risiko stunting dimana seluruh penanganan COVID-19 juga harus memperhatikan penanganan stunting.

3.4 Inovasi Penanganan Stunting

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Yayasan Seribu Cita Bangsa dan Roche Indonesia meluncurkan *Center of Excellence (CoE)* stunting di Labuan Bajo. CoE ini merupakan sebuah pendekatan multi-sektoral yang komprehensif, untuk pencegahan stunting melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait. CoE ini dirancang untuk menjangkau 21 puskesmas (atau sebanyak 100.000 ibu dan anak) sebagai upaya menurunkan stunting sebesar 5-10 persen di kabupaten Manggarai Barat, NTT. Selain itu, proyek ini juga diharapkan menjadi model untuk pengentasan masalah stunting secara berkelanjutan.

Center of Excellence ini berfungsi sebagai sebuah pusat pelatihan di mana para bidan dan petugas kesehatan masyarakat yang telah diseleksi akan dilatih dan diberi alat ajar berbasis bukti sebelum mereka kembali ke pusat layanan kesehatan dan rumah sakit tempat mereka bekerja, untuk memberi pelatihan, membagikan pengetahuan, alat dan teknologi secara langsung kepada para relawan kesehatan desa dan masyarakat.

Ketrampilan Bidan dan para petugas kesehatan di garda terdepan dari seluruh propinsi mendapatkan pelatihan yang inovatif dan kesempatan berbagi serta penguatan sistem para pembuat kebijakan dan influencer dapat menjadikan CoE sebagai wadah pembelajaran stunting, pemberdayaan perempuan, distribusi dana desa dan transparansi data.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang melakukan inovasi dan melakukan terobosan-terobosan penanganan stunting. Pembentukan *Centre of Excellence* yang merupakan kerja sama dengan

pihak swasta hendaknya harus diikuti daerah lain untuk mempercepat penanganan stunting.

2. Komisi IX DPR RI mendukung penuh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi *leading* sektor pencegahan dan penanggulangan stunting.
3. Komisi IX DPR RI mendesak adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat kolaborasi guna memastikan upaya mengatasi stunting berjalan efektif dan membuahkan hasil yang optimal.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN untuk meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai penanganan stunting bagi masyarakat khususnya para remaja putri, calon ibu dan ibu sebagai garda terdepan pencegahan stunting berbasis gizi keluarga.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera mengimplementasikan kebijakan intervensi gizi spesifik dengan memanfaatkan pangan lokal dan kearifan budaya lokal sehingga lebih berkesinambungan.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunker Spesifik tentang Pengawasan Penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai beserta seluruh SKPD and dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat serta seluruh mitra yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 November 2020

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA**

**IMMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331**